



**Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Republik Indonesia**

Siaran Pers Nomor: 352/HUMAS PMK/XII/2023

Menko PMK: Kesejahteraan Nelayan Mutlak, Jangan Sampai Jatuh Miskin

***Pemerintah Akan Bangun Ekosistem untuk Sejahterakan Masyarakat Nelayan**

KEMENKO PMK -- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyatakan, permasalahan kemiskinan pada nelayan menjadi masalah pelik yang harus dituntaskan.

Hal tersebut disampaikannya pada Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah Tentang Solusi untuk Mengatasi Permasalahan Nelayan di Wilayah Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, secara daring, pada Rabu (6/12/2023).

"Saat ini angka kemiskinan tertinggi ini di nelayan. Bukan di petani lagi. Makanya ini jadi urusan saya untuk mensejahterakan nelayan," ungkap Muhadjir.

Berbagai permasalahan yang dialami oleh nelayan di Brondong, Kabupaten Lamongan, disampaikan oleh Ketua Rukun Nelayan Brondong Mugianto di antaranya adalah masalah kesejahteraan, kemudian masalah harga ikan yang terus merosot dari nelayan ke tengkulak, kelangkaan bahan bakar minyak solar, dan juga pengelolaan koperasi.

Muhadjir menyampaikan, permasalahan yang dialami oleh nelayan Brondong Lamongan merupakan masalah yang menjadi cerminan kondisi nelayan di Indonesia. Karenanya perlu ada solusi yang bisa menuntaskan permasalahan nelayan.

Kemudian, Menko PMK mengatakan, pemerintah akan berupaya membenahi ekosistem nelayan dan memperbaiki taraf hidup kesejahteraan nelayan. Mulai dari proses nelayan menangkap ikan dengan akan menyelesaikan masalah kelangkaan bahan bakar minyak solar yang digunakan perahu nelayan. Juga akan diusulkan alternatif penggunaan perahu dengan konverter bahan bakar gas LPG yang akan dikaji oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

Kemudian masalah harga ikan yang saat ini masih tidak stabil karena kendala kesegaran ikan, akan dilakukan kajian berupa penyediaan kapal dengan sistem 'cold storage' yang diharapkan bisa menjaga keaegaran ikan sehingga harga tidak merosot.

Untuk pengelolaan rantai pasok pemasaran ikan dari Tempat Penampungan Ikan (TPI), kemudian ke tangan tengkulak, dan juga sampai ke tangan konsumen, nantinya akan ditangani lebih lanjut dari pemerintah daerah, Koperasi Unit Desa (KUD), Kemenkop UKM, dan Kemendagri, yang akan menindaklanjuti permasalahan tersebut.

Selain itu, untuk masalah kesejahteraan sosial bagi para nelayan, pemerintah akan berupaya untuk melindungi seluruh nelayan dengan skema jaring pengaman sosial, seperti bantuan sosial dan juga BPJS Ketenagakerjaan, yang diharapkan bisa menjaga kesejahteraan nelayan.

"Intinya kita ingin membenahi ekosistem, mulai dari nelayan menangkap, dapat ikan, bagaimana ikan termanfaatkan di industri. Modelnya nanti kita bikin di Brondong. Kalau ini modelnya bisa dibentuk nanti tinggal replikasi ke tempat lain," ujarnya.

Sebagai informasi, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, merupakan salah satu daerah penghasil ikan terbesar di Pulau Jawa. Brondong sendiri merupakan kawasan yang disebut sebagai Pelabuhan Perikanan Nasional (PPN). Di Brondong terdapat ribuan masyarakat nelayan yang menjadikan laut sebagai tumpuan penghidupan.

Karenanya, Muhadjir berharap, penanganan kesejahteraan nelayan di Kecamatan Brondong bisa menjadi model yang baik yang nantinya akan direplikasi sebagai penanganan kesejahteraan nelayan secara nasional.

"Ini akan segera kita tindaklanjuti. Saya akan pantau terus sampai ada realisasi konkret. Pokoknya nelayan jangan sampai ada yang ditelantarkan. Saya juga akan telpon Pak Bupati. Semua ingin terbaik untuk kepentingan masyarakat," ungkapnya.

Muhadjir mengatakan, apabila nelayan sejahtera, artinya konsumsi ikan juga banyak dan secara beriringan stunting di Indonesia seharusnya bisa tertangani.

"Pembangunan sektor perikanan ini mutlak karena kota negara pulau. Harusnya kita memiliki ketergantungan tinggi pada ikan terutama laut, lucunya di daerah banyak ikan malah stuntingnya tinggi. Jadi kita juga ingin merubah gaya hidup masyarakat supaya suka makan ikan," pungkasnya.

Dalam rapat tersebut hadir secara daring Rukun Nelayan Brondong, Ketua PPN Brondong, KUD Minatani Brondong, jajaran pemangku kepentingan dari Pemda Jatim, Pemkab Lamongan, BRIN, Kemensos, Kemendagri, Kemenkop UKM, KKP, Kementerian ESDM dan BPH Migas. (*)

**Bagian Humas dan Perpustakaan,
Biro Hukum, Informasi dan Persidangan,
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
roinfohumas@kemenkopmk.go.id
www.kemenkopmk.go.id
Twitter@kemenkopmk
IG: kemenko_pmk**